DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1/DPR RI/V/2025-2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2025-2029 DAN PERUBAHAN KEDUA PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 *juncto* Pasal 66 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 *juncto* Pasal 40 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, telah menetapkan Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2026;

b. bahwa Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2026 telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI/II/2025-2026 tentang Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026;

c. bahwa Keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia dan Panitia Perancang

Paraf 1	Paraf 2

Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 15 April 2026 telah menyepakati Perubahan Ketiga Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026 untuk ditetapkan;

d. bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 126);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 668);

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI/II/2025-2026 tentang Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026;

Paraf 1	Paraf 2

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-19 tanggal 20 Mei 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2025-2029 DAN PERUBAHAN KEDUA PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2026.**

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Ketiga Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR RI;
6. Para Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Ketua Fraksi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat;
8. Sekretaris Jenderal DPR RI;
9. Para Deputi, Inspektur Utama, dan Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI;
10. Para Kepala Biro/Pusat Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 Mei 2026

KETUA,

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

Paraf 1	Paraf 2

LAMPIRAN I KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1/DPR RI/V/2025-2026
TANGGAL : 20 MEI 2026

DAFTAR
PERUBAHAN KETIGA PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2025-2029

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR	
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	DPR	
5.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	DPR	
6.	RUU tentang Perkumpulan	DPR	
7.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR	
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR	
9.	RUU tentang Sistem Tata Produksi dan Niaga Pangan	DPR	

Paraf 1	Paraf 2

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
10.	RUU tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Hewan	DPR	
11.	RUU tentang Pertanian	DPR	
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	DPR	
13.	RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR	
14.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	DPR	
15.	RUU tentang Pertekstilan	DPR	
16.	RUU tentang Sandang	DPR	
17.	RUU tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia	DPR	
18.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR	
19.	RUU tentang Bank Makanan	DPR	
20.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	DPR	
21.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	DPR/ PEMERINTAH	
22.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR	
23.	RUU tentang Kefarmasian	DPR	
24.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40	DPR	

Paraf 1	Paraf 2

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Tahun 2009 tentang Kepemudaan		
25.	RUU tentang Pendidikan dan Layanan Kedokteran Hewan	DPR	
26.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	DPR/ PEMERINTAH	
27.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR/ PEMERINTAH	
28.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR	
29.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR	
30.	RUU tentang Permuseuman	DPR/ PEMERINTAH	
31.	RUU tentang Penghapusan Piutang Negara	DPR	
32.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	DPR	
33.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR	
34.	RUU tentang Investasi Negara	DPR	
35.	RUU tentang Profesi Kurator	DPR	
36.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR/ PEMERINTAH	
37.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	DPR	

Paraf 1	Paraf 2

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
38.	RUU tentang Pidana Tutupan	DPR	
39.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR	
40.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	DPR	
41.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten	DPR	
42.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara	DPR	
43.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang	DPR	
44.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	DPR	*Omnibus* (Klaster Pendidikan Kedokteran dan Klaster Pelayanan Kesehatan/Obat)
45.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR	
46.	RUU tentang Boikot, Divestasi, dan Sanksi	DPR	
47.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR	
48.	RUU tentang Keamanan Nasional	DPR	
49.	RUU tentang Penyadapan	DPR	
50.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR	
51.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13	DPR	

Paraf 1	Paraf 2

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin		
52.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR	
53.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR	
54.	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR	
55.	RUU tentang Komoditas Khas	DPR	
56.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	DPR/DPD	
57.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	DPR	
58.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	DPR	
59.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	DPR	
60.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria	DPR	
61.	RUU tentang Pengelolaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Moda Transportasi	DPR	
62.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR	

Paraf 1	Paraf 2

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
63.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	DPR	
64.	RUU tentang Pengampunan Pajak *(Tax Amnesty)*	DPR	
65.	RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional	DPR	
66.	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR	
67.	RUU tentang Kawasan industri	DPR	
68.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR	
69.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR	
70.	RUU tentang *Patriot Bond*/RUU tentang Surat Berharga	DPR	
71.	RUU tentang Transportasi *Online*	DPR	
72.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	DPR	
73.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri	DPR	
74.	RUU tentang Satu Data Indonesia	DPR	
75.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DPR	
76.	RUU tentang Perlelangan	DPR/ PEMERINTAH	

Paraf 1	Paraf 2

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
77.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR	
78.	RUU tentang Daya Anagata Nusantara	DPR	
79.	RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman/RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPR	*Omnibus Law*
80.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/ PEMERINTAH	
81.	RUU tentang Pekerja Lepas/RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG	DPR/ PEMERINTAH	
82.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
83.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
84.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
85.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	*Operan (Carry Over)*

Paraf 1	Paraf 2

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Narkotika (RUU tentang Narkotika dan Psikotropika)		
86.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
87.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	DPR/ PEMERINTAH	
88.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	DPR/ PEMERINTAH	Operan *(Carry Over)*
89.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	DPR/ PEMERINTAH	
90.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	DPR/ PEMERINTAH	
91.	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara)	DPR/ PEMERINTAH	
92.	RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati)	DPR/ PEMERINTAH	
93.	RUU tentang Grasi (RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi)	DPR/ PEMERINTAH	
94.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	DPR/ PEMERINTAH	
95.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR/ PEMERINTAH	
96.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR/ PEMERINTAH	
97.	RUU tentang Perampasan Aset (RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana)	DPR/ PEMERINTAH	

Paraf 1	Paraf 2

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
98.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (RUU tentang Desain Industri)	DPR/ PEMERINTAH	
99.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	DPR/ PEMERINTAH	
100.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/RUU tentang Hukum Acara Sengketa Informasi	DPR/ PEMERINTAH	
101.	RUU tentang Penyesuaian Pidana/RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah	DPR/ PEMERINTAH	
102.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/DPD	
103.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	DPR/DPD	*Operan (Carry Over)*
104.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR/DPD	
105.	RUU tentang Pertanahan	DPR/DPD	
106.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara	DPR/DPD	

Paraf 1	Paraf 2

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah		
107.	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR/DPD	
108.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR/DPD	
109.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPR/DPD	
110.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPR/DPD	
111.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/DPD	
112.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	DPR/DPD	
113.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	DPR/DPD	
114.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR/DPD	
115.	RUU tentang Sumber Daya Genetik	DPR/DPD	
116.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang	DPR/DPD	

Paraf 1	Paraf 2

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan		
117.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	DPR/DPD	
118.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	DPR/DPD	
119.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR/DPD	
120.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR/DPD	
121.	RUU tetang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/DPD	
122.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Miiik Negara	DPR/DPD	
123.	RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	DPR/DPD	*Operan (Carry Over)*
124.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	DPR/DPD	
125.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34	DPR/DPD	

Paraf 1	Paraf 2

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji		
126.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/DPD	
127.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPR/DPD	
128.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/RUU tentang Sistem Pengupahan	DPR/DPD	
129.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR/DPD	
130.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/DPD	
131.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	DPR/DPD	
132.	RUU tentang Kesehatan Masyarakat	DPR/DPD	
133.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/DPD	
134.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	DPR/DPD	
135.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR/DPD	
136.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43	DPR/DPD	

Paraf 1	Paraf 2

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Tahun 2007 tentang Perpustakaan		
137.	RUU tentang Ekonomi Syariah	DPR/DPD	
138.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	DPR/DPD	
139.	RUU tentang Keuangan Negara/RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR/DPD	(*Omnibus Law*)
140.	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	DPR/DPD	*Operan (Carry Over)*
141.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR/DPD	
142.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	DPR/DPD	
143.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	DPR/DPD	
144.	RUU tentang Geologi	DPR/DPD	
145.	RUU tentang Keanekaragaman Hayati	DPR/DPD	
146.	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim/RUU tentang Perubahan Iklim/RUU tentang Keadilan Iklim	DPR/DPD	
147.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	DPR/DPD	
148.	RUU tentang Kewirausahaan/ RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR/DPD	

Paraf 1	Paraf 2

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
149.	RUU tentang Masyarakat Adat	DPR/DPD	
150.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR/DPD	
151.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPR/DPD	
152.	RUU tentang Pembangunan Keluarga Berkualitas/RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR/DPD	
153.	RUU tentang Sistem Transportasi dan Logistik Nasional/RUU tentang Sistem Jaringan Transportasi Nasional/RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	PEMERINTAH	
154.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/ RUU tentang Jaminan Sosial Pekerja Rentan	DPR/DPD	
155.	RUU tentang Bahasa Daerah	DPR/DPD	
156.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPR/DPD	
157.	RUU tentang Kesetaraan Gender	DPR/DPD	
158.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPR/DPD	
159.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	DPR/DPD	
160.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara	DPR/DPD	

Paraf 1	Paraf 2

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
161.	RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	PEMERINTAH/ DPD	
162.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara	PEMERINTAH/ DPD	*Operan (Carry Over)*
163.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal	PEMERINTAH	
164.	RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional	PEMERINTAH	
165.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara	PEMERINTAH	
166.	RUU tentang Badan Usaha	PEMERINTAH	
167.	RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	PEMERINTAH	
168.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	PEMERINTAH	
169.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	PEMERINTAH	
170.	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH	
171.	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH	
172.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	PEMERINTAH	
173.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH	
174.	RUU tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH	
175.	RUU tentang Persandian	PEMERINTAH	

Paraf 1	Paraf 2

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
176.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	PEMERINTAH	
177.	RUU tentang Jaminan Benda Bergerak	PEMERINTAH	
178.	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH	
179.	RUU tentang Keamanan Laut	PEMERINTAH	
180.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia	PEMERINTAH	
181.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	PEMERINTAH	
182.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	PEMERINTAH	
183.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	PEMERINTAH	
184.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	PEMERINTAH	
185.	RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	DPD	
186.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPD	
187.	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
188.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2013	DPD	

Paraf 1	Paraf 2

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	tentang Pengelolaan Aset Daerah		
189.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	PEMERINTAH	
190.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	DPD	
191.	RUU tentang Ketransmigrasian	DPD	
192.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	DPD	
193.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	DPD	
194.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPD	
195.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPD	
196.	RUU tentang Perkotaan	DPD	
197.	RUU tentang Material Maju	DPD	
198.	RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	DPR	Usulan Baru Tahun 2025

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.

Paraf 1	Paraf 2

3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

KETUA,

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

Paraf 1	Paraf 2

LAMPIRAN II KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1/DPR RI/V/2025-2026
TANGGAL : 20 MEI 2026

DAFTAR
PERUBAHAN KEDUA PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2026

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	DPR (KOMISI I)	
2.	RUU tentang Penyiaran	DPR (KOMISI I)	
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR (KOMISI II)	
4.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	DPR (KOMISI II)	
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR (KOMISI III)	
6.	RUU tentang Perampasan Aset (RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana)	DPR (KOMISI III)	
7.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR	

Paraf 1	Paraf 2

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
		(KOMISI III)	
8.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	DPR (KOMISI III)	Operan *(Carry Over)* *Perubahan Pengusul RUU (Semula Usulan Pemerintah menjadi usulan DPR)*
9.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	DPR (KOMISI III)	Operan *(Carry Over)* *Perubahan Pengusul RUU (Semula Usulan Pemerintah menjadi usulan DPR)*
10.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR (KOMISI IV)	
11.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR (KOMISI IV)	
12.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR (KOMISI V)	
13.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR (KOMISI VI)	
14.	RUU tetang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR (KOMISI VI)	
15.	RUU tentang Kawasan Industri	DPR (KOMISI VII)	
16.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR (KOMISI VIII)	

Paraf 1	Paraf 2

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
17.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR (KOMISI VIII)	
18.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR (KOMISI IX)	
19.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR (KOMISI X)	
20.	RUU tentang Keuangan Negara	DPR (KOMISI XI)	(*Omnibus Law*)
21.	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	DPR (KOMISI XII)	*Operan (Carry Over)*
22.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPR (KOMISI XII)	
23.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR (KOMISI XIII)	
24.	RUU tentang Profesi Kurator	DPR (KOMISI XIII)	
25.	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR (BADAN LEGISLASI)	
26.	RUU tentang Pertekstilan	DPR (BADAN LEGISLASI)	
27.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	
28.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	

Paraf 1	Paraf 2

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
		(BADAN LEGISLASI)	
29.	RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional	DPR (BADAN LEGISLASI)	
30.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	DPR (BADAN LEGISLASI)	
31.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR (BADAN LEGISLASI)	
32.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri	DPR (BADAN LEGISLASI)	
33.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR (BADAN LEGISLASI)/ DPD	
34.	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPR (BADAN LEGISLASI) / DPD	
35.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	
36.	RUU tentang Satu Data Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	
37.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	DPR (BADAN LEGISLASI)	
38.	RUU tentang Transportasi *Online*	DPR (BADAN LEGISLASI)	
39.	RUU tentang Pekerja Lepas/RUU tentang Pekerja	DPR	

Paraf 1	Paraf 2

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG	(BADAN LEGISLASI)	
40.	RUU tentang Perlelangan	DPR (BADAN LEGISLASI)	
41.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR (BADAN LEGISLASI)	
42.	RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (dalam Prolegnas 2025-2029 berjudul RUU tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Hewan)	DPR (BADAN LEGISLASI)	
43.	RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman/RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPR (BADAN LEGISLASI)	*Omnibus Law*
44.	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	DPR (ANGGOTA)/ DPD	
45.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	DPR (ANGGOTA)	
46.	RUU tentang Masyarakat Adat	DPR (BADAN LEGISLASI) / DPD	*Perubahan Pengusul RUU (Semula Usulan Anggota menjadi usulan Badan Legislasi)*
47.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR (ANGGOTA) / DPD	

Paraf 1	Paraf 2

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
48.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	DPR (ANGGOTA)	
49.	RUU tentang Komoditas Khas	DPR (ANGGOTA)	
50.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DPR (ANGGOTA)	
51.	RUU tentang Bank Makanan	DPR (ANGGOTA)	
52.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	
53.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH	
54.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	PEMERINTAH	
55.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	PEMERINTAH	
56.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	
57.	RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati)	PEMERINTAH	
58.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara	PEMERINTAH	
59.	RUU tentang Jaminan Benda Bergerak	PEMERINTAH	
60.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH	
61.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12	PEMERINTAH	

Paraf 1	Paraf 2

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan		
62.	RUU tentang Badan Usaha	PEMERINTAH	
63.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	PEMERINTAH	
64.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH	
65.	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD	
66.	RUU tentang Penyadapan	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan Baru Tahun 2025
67.	RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan Baru Tahun 2025
68.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	Usulan Baru Tahun 2025

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

KETUA,

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

Paraf 1	Paraf 2